

## ISI

Juru Runding >>>1-3

Senator Minta PPB Kirim Utusan ke Aceh>>>4

Swedia minta Aceh Diselesaikan dengan Politik >>>4

Demo tuntutan Referendum di Yogya >>> 5-6

ASNLF Kirim Delegasi ke Konferensi di Jenewa>>>6

Perwira Kostrad sampai Pasukan Raider Tewas di Aceh >>>7

Ranjau Darat di Aceh>>>8-9

Mengenal Bumi Iskandar Muda>>> 10-11

Peulajaran Basa Aceh >>>12

# DUTA ACHEH

suara aceh di negeri seberang

◆ edisi 1/september 2004

## JURU RUNDING DAN KOMITMEN DAMAI BANGSA ACEH

Ketika akhir Juli lalu dikabarkan kondisi kesehatan Sofyan Ibrahim Tiba memburuk ditahanan Polda, dengan mudah kita menebak bahwa pihak keluarganya akan mengalami kesulitan untuk membawa juru runding GAM itu ke rumah sakit. Tebakan itu sedikitpun tak meleset.

“Kami minta izin di Polda, katanya tidak lagi menjadi wewenang mereka, karena sudah ada ketetapan hukum tetap. Lalu kami ke Kejaksaan Tinggi. Di sana dibilang itu sudah menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Di sini pun, kami disuruh ke Pengadilan Negeri. Pokoknya, kami *diping-pong*,” demikian penuturan Rahmayanti adalah anak sulung Sofyan Ibrahim Tiba seperti dikutip beberapa media.

Setelah lebih seminggu melalui proses yang melelahkan dan sangat prosedural, baru Kamis (5/8) izin untuk merawat Sofyan di rumah sakit dikeluarkan. Itupun setelah pihak keluarga menandatangani surat yang menyatakan menjamin keselamatan dan keamanan Sofyan.

Padahal pada masa itu kondisi Sofyan sudah sangat memprihatinkan. Menurut Rahmayanti orang tuanya sudah sangat lemah, sehari-hari tidak makan dan terus menerus muntah. Tgk Sofyan mengidap penyakit *diabetes mellitus*, dari telinganya terus keluar cairan dan terjadi pembengkakan di bagian kepala dan dada. Lehernya juga terganggu sehingga susah untuk makan. Kala dijenguk akhir Juli lalu ahli hukum itu sudah terkulai di sel Polda yang sempit. “Bapak tidak sanggup lagi duduk, ketika jalan harus dipapah” ujar Yanti.

Rahmayanti yang tengah mengandung anak keduanya sangat kesal dengan proses berbelit-belit yang harus dilaluinya. “Ini urusan *kok* prosedur betul. Padahal orang sakit kan enggak bisa menunggu,” kecamnya.

Kekesalan Rahmayanti sangat berdasar, karena dalam aturan Indonesia sendiri—tepatnya termuat pada PP No 58/tahun 99—dengan jelas disebutkan bahwa salah satu hak tahanan adalah mendapat perawatan di rumah sakit kalau memang diperlukan, bahkan dalam aturan itu disebutkan negara berkewajiban membayar setiap biaya yang dikeluarkan karena perawatan itu.

Tak pasti siapa yang akan membayar biaya pengobatan Sofyan Ibrahim Tiba nantinya, yang jelas ketidakpatuhan aparat Indonesia terhadap aturan yang ditetapkannya sendiri bukanlah suatu yang mengherankan. Penahanan Sofyan sendiri adalah pembangkangan yang paling nyata Indonesia terhadap apa yang telah mereka tetapkan sendiri. Sofyan Ibrahim Tiba bersama empat juru runding GAM lainnya ditangkap setelah pemerintah Indonesia mengumumkan Darurat Militer 19 Mei 2003 lalu. Pengadilan Indonesia memvonis Sofyan dengan hukuman 15 tahun, Tgk Nashiruddin, Muhammad Usman Lampoh Awe, dan T. Kamaruzzaman masing-masing dengan hukuman 13 tahun penjara. Sedangkan Amni bin Ahmad Marzuki dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Sebagaimana tahanan GAM lainnya, para juru runding ini juga dibuang dari Aceh ke penjara-penjara di Jawa.

Dalam peradaban yang modern sekarang tentu saja penahanan ini sangat tidak masuk akal, apalagi kelima juru runding itu divonis dengan undang-undang anti teroris.



“Dibelahan dunia manapun hal semacam ini tidak terjadi, karena juru runding untuk misi-misi perdamaian tidak akan diadili dengan tuduhan makar dan teroris,” kata T. Kamaruzzaman atau yang dikenal Pon Man, dalam pembelaannya dipersidangan September tahun lalu. Juru runding lain, Tgk Ibrahim Usman Lampoh Awe juga menyatakan keterlibatannya sebagai juru runding karena tidak ingin konflik Aceh diselesaikan dengan kekerasan dan tidak mau lagi melihat pertumpahan darah di Aceh.

Adnan Buyung Nasution yang merupakan pengacara para juru runding tersebut merasa heran dengan masa hukuman yang harus mereka terima. Menurut Buyung, klien-nya tidak wajar dihukum karena keterlibatannya dalam proses perdamaian. Ia juga mengemukakan pengadilan yang tidak mempertimbangkan fakta bahwa kekerasan yang menurun selama periode perjanjian damai. Buyung juga menyebutkan tidak terdapat bukti kelima mereka terlibat dalam aktivitas terorisme seperti yang dituduhkan.

Usaha untuk mencari keadilan kepada institusi hukum yang lebih tinggi telah dilakukan pihak pembela yang dikoordinir Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu. Mulai dari mengajukan banding sampai kasasi ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Namun hasilnya tidak berubah, keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh, dan usaha untuk mengajukan kasasi ke MA juga kandas setelah lembaga hukum tertinggi di Indonesia ini menolaknya awal bulan ini. “Putusan ini sudah cukup adil” kata Al Manar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh.

Banyak pihak ditingkat internasional melihat vonis hukum itu sebagai suatu yang kontroversial. Menteri Luar Negara Amerika segera menyampaikan penyesalannya sesaat setelah Sofyan Tiba Cs ditangkap. Tapol sebuah NGO yang bergerak dibidang HAM yang berbasis di Inggris menyatakan penangkapan itu tidak bisa dibenarkan, karena dalam perjanjian sebelumnya (COHA) telah disebutkan bahwa juru runding akan dijamin tidak akan ditangkap atau dihukum karena keterlibatannya dalam proses perdamaian. Di Australia, Dr Lesley Mc Chulloch, seorang peneliti konflik Aceh menyatakan kekhawatiran terhadap prospek perdamaian di Aceh, “Bagaimana mungkin mereka yang menyediakan dirinya untuk proses perdamaian juga dijadikan target penangkapan dan kekerasan?”

Namun bagi Bangsa Aceh, tindakan tidak masuk akal yang dilakukan Indonesia ini sama sekali tidak mengherankan. Pimpinan GAM Malik Mahmud lewat siaran pers yang dikeluarkan 26 Oktober 2003 menyatakan tidak terkejut sama sekali dengan vonis yang menimpa juru rundingnya. Bagi GAM sejak ditangkapnya juru rundingnya pada Mei 2003 lalu sudah sangat jelas pemerintahan Megawati sama sekali tidak mengindahkan norma-norma internasional tentang kekebalan hukum dan perlindungan hukum bagi perunding damai. Menurut Mahmud, yang merupakan Perdana Menteri Negara Aceh, penahanan juru runding untuk perdamaian ini merupakan pertanda yang sangat jelas bahwa upaya pencarian jalan damai dalam penyelesaian konflik Aceh tidak lagi menjadi agenda NKRI. (lihat box : Siaran Pers PNA)

Memang tak ada yang aneh kalau agenda kekerasan lebih mendapatkan tempat di NKRI, apalagi dalam hubungannya dengan Aceh. Bagi Kemal Fasya, dosen muda dari Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe,

kekerasan dan kekuasaan dalam NKRI bukan saja merupakan sebuah agenda atau strategi bahkan sudah menjadi filosofi negara itu, sehingga yang muncul seperti ujaran Ryamizard Ryacudu, “tidak ada dialog dengan pemberontak Aceh”; Amien Rais, “pendekatan militerisme perlu diambil untuk mempertahankan NKRI”; Susilo Bambang Yudhoyono, “tidak ada gunanya mempertahankan perdamaian”; Megawati, “Itu telah disetujui DPR”; Gus Dur, “Hanya segelintir yang minta merdeka”, R. Pramono (Mantan Pangdam Bukit Barisan akhir awal 90-an), “Jika kalian melihat GPK, jangan ragu sedikitpun, ambil parang, serang, dan tebas mereka!.” Endriantono Sutarto, “Selama GAM masih ada, maka kejar, kejar dan kejar”

Ini sangat berbalik dengan komitmen yang ditunjukkan bangsa Aceh. Meski para juru rundingnya ditangkap—bahkan berkali-kali—namun tekad untuk melanjutkan perundingan damai tetap menjadi prioritas GAM. Malik Mahmud dalam sebuah dialog dengan parlemen Eropah Oktober lalu menegaskan kesediaan pihaknya untuk melanjutkan dialog, dengan syarat pembebasan tanpa syarat terhadap semua juru rundingnya. Di tingkat lapangan pun tekad untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai pun sama kuatnya. “Kalau RI membuat operasi militer, terserah. Tapi, kami tegaskan, kami ingin menyelesaikan Aceh ini dengan damai, demokratis, dan tulus ikhlas” demikian tutur Sofyan Daud, juru bicara Tentera Nasional Aceh (TNA) dalam sebuah wawancara dengan majalah Tempo tahun lalu. Kelompok muda dan mahasiswa Aceh yang lahir dan besar dari kekerasan demi kekerasan yang dipertontonkan Indonesia juga tidak menggagas agenda kekerasan sebagai bentuk perlawanannya, mereka menekankan jalur politik dan demokrasi untuk mencapai kemerdekaan Aceh.

Kalau demikian adanya, bagi Bangsa Aceh keberadaan juru runding sangat penting artinya. Sehingga pengorbanan-pengorbanan yang harus dialami para negosiator itu, sebagaimana dinyatakan Malik, menjadi pemicu semangat bangsa Aceh untuk bersatupadu melawan musuh bersama, yakni Indonesia. □

#### SIARAN PERS PNA SEHUBUNGAN PENANGKAPAN JURU RUNDING

Pemerintah Negara Aceh mengutuk, tetapi tidak terkejut oleh hukuman-hukuman berat, dari 12 hingga 15 tahun penjara, yang telah dijatuhkan ke atas lima anggota perunding damai Aceh oleh pengadilan Indonesia di Banda Aceh. Beberapa orang lainnya juga menerima hukuman serupa, termasuk seorang perempuan, Tjut Nurasjikin, pekerja kemanusiaan yang dituduh sebagai panglima Batalion Inong Balee TNA, suatu tuduhan palsu semata-mata.

Beberapa bulan yang lalu ketika kelima perunding tersebut mulai dihadapkan ke pengadilan atas tuduhan pengkhianatan dan terorisma, memang sudah jelas bahwa norma-norma internasional tentang kekebalan hukum dan perlindungan bagi para perunding damai tidak mempunyai arti apa-apa bagi pemerintahan Presiden Megawati. Hal itu juga merupakan pertanda yang paling jelas hingga kini bahwa pencarian penyelesaian cara damai untuk masalah-masalah di Aceh tidak lagi menjadi bahagian daripada agenda NKRI.



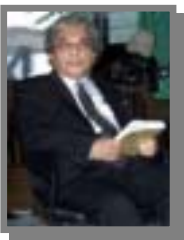
## MEREKA YANG DITANGKAP

### Sofyan Ibrahim Tiba



Lahir di Beureneuen, Pidie pada 5 Desember 1947, pria kritis dan vokal ini menamatkan pendidikan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Unsyiah tahun 1990. Bekas politisi di PAN dan sebelumnya PPP ini merupakan dosen di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Keterlibatan Sofyan dalam perundingan dimulai sejak Jeda pertama Juni 2000. Kala itu Sofyan merupakan salah seorang anggota Komite Bersama Bantuan Kemanusiaan. Pada masa COHA peranannya dalam perundingan semakin besar, GAM mempercayakan tokoh Muhammadiyah Aceh ini sebagai Ketua Komite Keamanan Bersama (JSC-Joint Security Committee)

### Muhammad Usman Lampoh Awe



Lelaki yang lahir di Lampoh Awe, Pidie 75 tahun lalu ini merupakan Menteri Keuangan dalam jajaran GAM. Tgk Usman telah bergabung dengan GAM sejak awal organisasi perjuangan kemerdekaan Aceh itu didirikan. Pada tahun 80-an dia ditangkap Kopassus dan harus mengalami siksaan yang berat. Dia dihukum selama 20 tahun dan dibebaskan ketika adanya amnesti umum di era Habibie. Semasa COHA Tgk Usman memegang jabatan Ketua Komite Bersama untuk Konsultasi Demokrasi. Setelah ditangkap bersama perunding lainnya, Tgk Usman kembali mendapat siksaan yang berat selama di sel Polda. Menurut sebuah sumber ini karena orang tua satu ini sama sekali menolak untuk berbahasa Indonesia ketika diintegrasikan anggota polisi.



### Nashirudin bin Ahmed

Lahir di Peusangan, Aceh Utara, 21 Januari 1955. Kehidupannya tergolong religius dan pernah sempat mengajar di Dayah Darul Ulum Matang Glumpang Dua. Nashirudin juga sempat menjadi

pengusaha di Jakarta dan bergabung dengan GAM sejak tahun 1986. Setelah menjadi anggota GAM semua aktivitas lainnya ditinggalkan dan dia lebih sering berada di hutan. Ketika Jeda Kemanusiaan diberlakukan, lelaki yang pintar berbahasa Inggris ini dipercaya sebagai ketua delegasi GAM dalam Komite Modalitas Keamanan.

### Teuku Kamaruzzaman



Nama T. Kamaruzzaman atau dikenal dengan Pon Man melejit ketika ia memimpin aksi memasuki kedutaan Belanda di Jakarta. Aksi yang diikuti 12 anggota Persatuan Rakyat Aceh (PRA) mereka meminta Kerajaan Belanda mencabut maklumat perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 sebagai sumber konflik Aceh hari ini. Kamaruzzaman mulai terlibat dalam perundingan sejak Jeda pertama Juni 2000 sebagai anggota Komite Bersama Bantuan Kemanusiaan. Sampai pemberlakuan COHA, Kamaruzzaman yang pernah menjadi ketua Pemuda Pancasila Aceh Utara ini tetap dipercaya mewakili GAM dalam setiap perundingan. Lelaki kelahiran Lhokseumawe 20 September 1960 ini sehari-hari dikenal sebagai seorang kontraktor dan anak mantan Sekwilda Aceh Utara.



### Amni bin Ahmad Marzuki

Amni merupakan kelahiran Kandang, Lhokseumawe 36 tahun lalu. Dalam jajaran GAM lelaki yang masih lajang ini merupakan Komandan Operasi TNA. Amni menyertai GAM pada tahun 1991. Ia sempat menetap di Malaysia dan termasuk dalam gelombang orang Aceh yang dipulangkan secara paksa dalam peristiwa Semenyih tahun 1997. Dalam insiden itu Amni tertembak dikaki dan cacat sampai sekarang. Kekerasan kembali dialaminya ketika kembali ke Aceh, yakni dalam peristiwa pemukulan oleh 100 orang TNI terhadap tahanan di Gedung KNPI, Lhokseumawe, yang menyebabkan 5 orang tewas. Setelah itu Amni dipenjarakan selama 6 bulan di Kota Cane. Ketika berlangsung COHA, Amni dipercayakan untuk memimpin Komite Bersama urusan Keamanan.

Para perunding kami telah menyatakan diri menyertai GAM untuk dapat mengambil bagian dalam proses damai yang ditengahi oleh pihak internasional. Dengan tiadanya bukti yang nyata tentang tuduhan pengkhianatan dan terorisme yang dilemparkan ke atas mereka, nampaknya komitmen dan kejujuran mereka kepada bangsa Aceh adalah satu-satunya 'kejahatan' mereka. Pelanggaran prinsip-prinsip keadilan yang demikian dahsyat itu hanyalah akan menambahkan lagi penghormatan dan kekaguman yang dirasakan oleh Pemerintah Negara Aceh terhadap mereka yang telah mengorbankan diri atas nama perdamaian dan keadilan, dan akan lebih menyatupadukan bangsa Aceh dalam menentang musuh bersama kami – pemerintah Indonesia.

Kami menyeru kepada masyarakat internasional untuk mengutuk sekeras-kerasnya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan itu, bukan saja ke atas para perunding kami, tetapi juga terhadap para pendukung perjuangan kemerdekaan, serta para pejuang hak-hak asasi manusia lainnya yang telah menjadi korban rasa takut dan gila bayang pemerintah Indonesia. Kebebasan berkumpul dan berbicara adalah hak-hak asasi manusia yang tidak dipunyai oleh bangsa Aceh.

Memang membuat strategi jangka panjang tidak pernah menjadi suatu kebolehan pemerintah Indonesia, apatah lagi

bagi pihak militer dan polisinya; kalau kebijakan begitu ada, tentu mereka akan sadar bahwa tindakan-tindakan demikian itu akan membuat bangsa Aceh lebih yakin dan lebih siap sedia berkorban untuk keadilan dan kemerdekaan dari penindasan.

Pemerintah Negara Aceh menyatakan kembali komitmennya dalam mencari penyelesaian cara damai bagi konflik Aceh dan mengundang pemerintah Indonesia untuk kembali ke dalam proses dialog demi menghentikan penderitaan manusia. Untuk memungkinkan hal tersebut, kami mengharapkan pembebasan segera para perunding kami yang merupakan komponen perlu untuk proses damai selanjutnya, demikian juga warga sipil lainnya yang tidak berdosa yang telah ditangkap dengan sewenang-wenangnya oleh militer dan polisi Indonesia dalam masa Darurat Militer.

Stockholm, 26 Oktober 2003

**MALIK MAHMUD**  
Perdana Menteri

Sumber : *Bulletin Penerangan Pemerintah Negara Aceh*

## SENATOR AMERIKA MINTA PBB SEGERA MENGIRIMKAN WAKIL KHUSUS KE ACHEH DAN PAPUA

Pada tanggal 20 Juli 2004 sebanyak 20 anggota senator Amerika dari berbagai negara bagian mengirimkan surat khusus kepada Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan berkaitan penindasan kemanusiaan yang sedang terjadi di Aceh dan Papua. Dalam surat itu para senator dari negara adidaya itu mendesak Sekjen PBB untuk segera mengirimkan wakil khususnya untuk memantau keadaan di Aceh dan Papua. Wakil khusus tersebut nantinya diharapkan memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB terhadap langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan konflik yang telah mengorbankan puluhan ribu jiwa di kedua kawasan tersebut.

Keprihatinan para senator itu berdasarkan pengamatan mereka terhadap kondisi di Aceh selama pemberlakuan militer yang diteruskan dengan darurat sipil dalam setahun terakhir ini. Menurut para senator telah terjadi korban jiwa yang sangat luar biasa akibat kebijakan militeristik yang dilakukan negara Indonesia tersebut. Dalam surat itu para senator menyampaikan bahwa lebih dari 2000 orang telah terbunuh di Aceh dalam satu tahun terakhir. Mengutip laporan Komnas HAM, para senator menyebutkan "adanya serangan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata, para korban dibunuh, disiksa, dilecehkan secara seksual dan diperkosa, terdapat korban-korban lainnya dari kalangan yang dinyatakan sebagai pemberontak yang tidak diproses secara hukum". Dalam laporan itu juga disebutkan adanya pelecehan terhadap anak-anak, pembakaran dan perampokan. Dengan tegas para senator berdasarkan laporan Komnas HAM, bahwa sebagian besar kekerasan dilakukan oleh tentera dan polisi Indonesia.

Selain itu kepada Kofi Annan, para senator juga mengingatkan bahwa tentera Indonesia telah menutup habis Aceh dari pantauan dunia luar, melarang dengan keras segala kegiatan lembaga bantuan kemanusiaan dan organisasi HAM Indonesia maupun internasional. Pelarangan terhadap media asing dan ancaman serta intimidasi terhadap media Indonesia juga menjadi poin penting yang disampaikan senator kepada Kofi Annan.

PBB sendiri, menurut para senator, telah dihina oleh pemerintah Indonesia dengan pemaksaan oleh militer Indonesia untuk menghentikan segala kegiatan lembaga bantuan kemanusiaan PBB di Aceh selama beberapa bulan pada tahun 2003.

Pada bagian akhir dari surat itu para senator mengkritik masyarakat dunia yang hanya berdiam diri dengan keadaan di Aceh dan Papua padahal tingkat kekerasan di kedua wilayah itu sangat besar. Sehingga mereka menekankan perlu segera dikirim wakil khusus PBB ke Aceh dan Papua.

Keduapuluh senator yang menandatangani surat itu adalah sebagai berikut Senator Frank R. Lautenberg (NJ/New Jersey), Senator Chris Dodd (CT/Connecticut), Senator Patrick J. Leahy (VT/Vermont), Senator Ron Wyden (OR/Oregon), Senator Dianne Feinstein, (CA/California), Senator Russell D. Feingold (WI/Wisconsin),

Senator Deborah Ann Stabenow (MI/Michigan), Richard J. Durbin (IL/Illinois), Senator Jon S. Corzine (NJ/New Jersey), Senator Herb Kohl (WI/Wisconsin), Senator Barbara Boxer (CA/California), Senator Barbara Mikulski (MD/Maryland), Senator Carl Levin (MI/Michigan), Senator Byron L. Dorgan (ND/North Dakota), Senator Patty Murray (WA/Washington), Senator Jeff Bingaman (NM/New Mexico), Senator Paul S. Sarbanes (MD/Maryland), Senator Jack Reed (RI/Rhode Island), Senator Daniel K. Akaka (HI/Hawaii), Senator Edward M. Kennedy (MA/Massachusetts).

### DUBES SWEDIA DI ACHEH: SELESAIKAN KONFLIK DENGAN POLITIK

Duta Besar Swedia, Lennart Linner agaknya cukup pandai memanfaatkan keadaan. Kunjungan ke Aceh untuk menyerahkan bantuan alat-alat kesehatan kepada anak-anak dan perempuan digunakan untuk melontarkan sikap negaranya terhadap penyelesaian konflik Aceh.

Didepan belasan wartawan di Banda Aceh Lennart menegaskan bahwa masalah Aceh adalah masalah politik. Karena itu menurutnya, penyelesaiannya harus juga dengan politik bukan dengan cara militer. "Ini sebenarnya masalah politik. Karenanya, kami berharap bisa diselesaikan secara politik juga," ujar Linner

Pernyataan duta besar dari negara tempat berdiamnya pimpinan GAM ini bertentangan dengan kebijakan militer yang sedang ditempuh Indonesia.

Linner datang ke Aceh bersama Menteri Kesehatan Indonesia Sujudi, utusan Kedutaan Kanada dan wakil dari United Nations Children's Fund (Unicef). Rombongan ini melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Aceh.

Linner menyayangkan Indonesia yang telah memilih jalan militer meski telah punya kesempatan menyelesaikannya lewat jalur politik yakni ketika perjanjian penghentian permusuhan (cessation of hostilities agreement) ditandatangani Desember 2002 lalu.

"Indonesia telah mencoba kedua-duanya. Tetapi lebih baik diselesaikan lewat jalur politik, karena jika menggunakan cara-cara militer akibatnya tidak akan menyelesaikan masalah," ujar Linner.

Pernyataan politik dan kunjungan dua hari Linner ke Aceh itu, menurut seorang aktivis Aceh di Jakarta, merupakan pertanda bahwa respon pemerintah Swedia terhadap permintaan Indonesia untuk mengadili pimpinan GAM merupakan cara Swedia agar memperoleh akses ke Aceh yang selama ini ditutup Indonesia terhadap dunia internasional.

Pernyataan politik itu juga menyebabkan Gubernur Abdullah Puteh kaget dan segera melakukan klarifikasi kepada wartawan bahwa kunjungan Linner tidak berhubungan dengan politik atau berhubungan dengan GAM.



## DEMO DI YOGJA : 500 ORANG MENOLAK MILITERISME DAN MENUNTUT REFERENDUM UNTUK ACHEH

Sebuah aksi untuk Aceh dan Papua digelar 22 Juli lalu di Yogyakarta. Aksi yang diikuti sekitar 500 peserta itu diberi judul “Pawai Rakyat dalam Melawan Militerisme dan Membangun Gerakan Solidaritas terhadap Rakyat Aceh dan Papua”. Dalam aksi yang berbentuk pawai itu peserta mengarak sebuah patung babi berkepala militer dan Megawati. Pawai yang juga diwarnai dengan peserta yang memakai pakaian adat Aceh dan Papua itu menarik simpati dari masyarakat yang dilalui.

Pawai ini diprakarsai oleh Solidaritas Aceh – Papua (SAP) yang merupakan organisasi pro demokrasi yang terbentuk setahun terakhir dan mendukung perjuangan rakyat Aceh dan Papua. Dalam pawai itu peserta aksi melalui pernyataan sikap yang dibacakan Lalu Hilman Afriandi, juru bicara SAP Yogyakarta, menghimbau dan meminta dukungan dari elemen demokrasi serta lapisan masyarakat Indonesia, khusus di Yogyakarta untuk bersama menyerukan keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Aceh dan Papua. Secara tegas mereka mengajak masyarakat Indonesia menuntut dan mendukung pemberian hak demokrasi bagi rakyat Aceh dan Papua dengan mekanisme referendum untuk penentuan nasib sendiri.

Selain itu, untuk tahap awal, peserta aksi juga menuntut untuk menghentikan operasi militer dan menarik pasukan non organik dari Aceh dan Papua. Juga mendesak GAM dan RI untuk kembali ke perundingan, menolak pemberlakuan otonomi dan pemekaran propinsi di Papua serta dalam lingkup Indonesia peserta aksi menolak UU berbau militeristik seperti UU Anti Terorisme, RUU Intelijen dan RUU KKR.

Dalam pernyataannya itu, mereka menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak punya komitmen dan niat baik untuk menyelesaikan

persoalan Aceh dan Papua secara adil dan demokratis. Kebijakan pemerintah yang terus menerus memberlakukan operasi militer di Aceh dan Papua merupakan provokasi politik yang berbentuk teror dan intimidasi karakter yang berujung pada penghilangan entitas sosial Aceh dan Papua.

Selain itu kepada rakyat Indonesia lainnya juga diingatkan bahwa operasi militer yang berlangsung di Aceh dan Papua telah mengakibatkan penderitaan yang panjang bagi rakyat di kedua wilayah ini. Dalam pernyataan itu juga dipaparkan data-data korban, khususnya di Aceh selama darurat sipil, korban terus bertambah. Data terakhir jumlah korban masyarakat sipil terhitung sebanyak 200 orang tewas, 25 orang diperkosa, ribuan korban luka-luka, 614 kasus penangkapan masyarakat pada masa Darurat Sipil. Kemudian lebih dari 3000 orang ditangkap, ditahan dan dipenjarakan tanpa melalui proses pengadilan yang adil pada masa Darurat Militer; 143 orang diantaranya dibuang ke penjara-penjara Tanah Jawa (143 orang dibuang pada Januari dan 171 lagi Mei 2004; penjara Jawa Tengah-Jawa Timur).

Selain dari segi ekonomi dan sosial disebutkan 72% dari 6000 perkampungan hidup dalam keadaan melarat, bila dipersentasekan 1.8 juta dari 4.2 juta jiwa masyarakat Aceh hidup dibawah garis kemiskinan ; dari 460.000 kepala rumah tangga, 377.000 diantaranya adalah Janda. Lain lagi sekolah yang hangus mencapai 869 gedung; ribuan anak didik tingkat SD-SMA terlantar belajar. Dengan kenyataan itu, tidak benar bila pemerintah mengatakan bahwa kondisi sosial politik keamanan di Aceh sekarang sudah jauh lebih baik, justru sebaliknya keberadaan tentara Indonesia di Aceh merupakan akar masalah yang menyebabkan hancurnya sendi-sendi sosial ekonomi politik rakyat Aceh.



sambungan..

**KRONOLOGI AKSI AKSI SAP DI YOGYAKARTA**

**10.25 WIB :** Aksi dimulai setelah berkumpulnya sekitar 500 orang massa aksi dari berbagai elemen gerakan Aceh, Papua beserta gerakan demokratik yang berada di Yogyakarta. Pawai dimulai dari bundaran UGM ini yang diawali dengan arahan-arahan aksi dari kordinator lapangan (korlap) serta pengaturan-pengaturan barisan massa aksi menurut setting yang telah dibuat.

**10.45 WIB :** Aksi yang bertajuk *Pawai Rakyat Dalam Melawan Militerisme Dan Membangun Gerakan Solidaritas Terhadap Rakyat Aceh Dan Papua* ini mulai melakukan long march. Semua perangkat aksi mulai bergerak, barisan aksi ini disusun dengan model barisan; barisan pertama *happening arts* yang menampilkan patung babi yang berukuran 6 meter dengan bentuk militer berkepala dua (Militer dan Megawati), yang kemudian diikuti oleh barisan pakaian adat dari papua (koteka) dan pakaian adat Aceh (topi meketup) kemudian diikuti oleh mobil komando yang memimpin massa aksi yang mengusung spanduk-spanduk tuntutan, bendera-bendera SAP beserta ratusan poster-poster tuntutan, pada aksi ini massa juga memakai ratusan slayer ikat kepala yang bertuliskan SAP.

Perjalanan aksi ini melewati titik-titik konsentrasi massa di Yogyakarta. Akibatnya titik-titik yang dilewati (UGM, Perempatan Gramedia, Tugu, DPRD, serta perempatan Rosomanunggal Malioboro yang berakhir dikantor Pos) mengalami macet. Perjalanan aksi tersebut juga mendapat respon dan simpatik dari masyarakat yang terus menyaksikannya disepanjang jalan yang dilewati. Perjalanan aksi ini juga diiringi oleh orasi-orasi politik dari elemen gerakan yang terlibat di SAP juga pidato-pidato politik dari pimpinan-pimpinan organisasi dan NGO, sehingga perjalanan aksi tersebut selalu bersemangat dengan diiringi oleh yel-yel serta nyanyian-nyanyian perjuangan.

**13.20 WIB :** Massa aksi sampai di perempatan Kantor Pos Besar sebagai titik terakhir long-march, setelah beberapa orasi dukungan maka juru bicara SAP Yogyakarta (Lalu Hilman Afriandi) membacakan pernyataan sikap aksi SAP, setelah itu korlap mulai memberikan arahan kepada massa tentang teknis pembubaran diri massa aksi, secara umum aksi massa tersebut berjalan dengan lancar, damai, simpatik tanpa adanya provokasi.

**ASNFL KIRIM DELEGASI KE KONFRENSI BANGSA-BANGSA ASLI SEDUNIA**

Pada tanggal 19-23 Juli 2004 lalu, sebuah delegasi Aceh dikirim Aceh Sumatra Liberation Front (ASNLF) untuk menghadiri Konferensi Bangsa-Bangsa Asli Se-Dunia untuk sesi ke 22. Konferensi yang diadakan oleh Kelompok Kerja untuk Bangsa-Bangsa Asli itu mengambil tempat di Palais des Nations Gedung PBB Jeneva. Konferensi yang dihadiri wakil-wakil masyarakat asli, wakil-wakil pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga PBB itu merupakan agenda tahunan kantor Komisi Tinggi HAM PBB.

Dalam konferensi tersebut delegasi Aceh mempresentasikan makalah tentang latar belakang perjuangan kemerdekaan Aceh terhadap penjajahan Indonesia. Dalam makalahnya delegasi Aceh juga menerangkan bahwa Aceh adalah negara yang sudah dikenal sejak awal pelayaran Bangsa-bangsa Eropa ke Timur. Sebagai negara, Aceh juga memiliki sistem pemerintahan dan administrasi yang mapan. Pembagian kekuasaan dalam negara Aceh pada masa itu juga sudah jelas seperti yang dijabarkan dalam : *'Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Bentara'*.

Sistem negara Aceh menjadi rusak setelah perang kemerdekaan Aceh dengan Belanda pada tahun 1873 yang dilanjutkan dengan penjajahan Jepang sampai sekarang penjajahan Indonesia. Delegasi Aceh juga mengingatkan akibat dari penjajahan-penjajahan itu dan perlawanan yang diberikan rakyat Aceh dari masa ke semasa, jumlah penduduk Aceh yang pada abad ke 19 mencapai 10 juta jiwa kini turun drastis menjadi 4 juta jiwa. Sehingga untuk menghindari kepunahan Bangsa Aceh, delegasi Aceh meminta partisipasi PBB, terutama untuk meluruskan kesalahan Indonesia yang memasukkan Aceh sebagai bagian dari negara tersebut.

**Demonstrasi 3 Bangsa**

Selain mengikuti acara resmi di dalam gedung, delegasi Aceh bersama delegasi Papua dan Maluku juga menggelar aksi di luar gedung. Aksi yang bertujuan mengutuk penjajahan Indonesia terhadap ketiga bangsa itu cukup menarik perhatian peserta konferensi dan pengunjung lain gedung PBB. Demonstrasi yang menggunakan pakaian adat ke tiga bangsa itu juga menarik perhatian jurnalis yang meliput di gedung PBB. Dalam demonstrasi tersebut, peserta aksi atas izin pihak yang berkuasa diperkenankan mengibarkan bendera masing-masing Bangsa di depan gedung PBB selama 4 jam. Ini memberi semangat kepada peserta aksi untuk terus memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dari penjajahan Indonesia.



## PERWIRA KOSTRAD SAMPAI ANGGOTA RAIDER TEWAS DALAM PERTEMPURAN DI ACHEH

Hasrat Indonesia untuk melumpuhkan perjuangan di Aceh agaknya masih jauh dari harapan, jangankan untuk menangkap pimpinan Tentera Nasional Aceh (TNA) malah tentera Indonesia kembali menjadi mangsa kerasnya perlawanan di Aceh. Kali ini seorang perwira dari Batalyon Infantri 321 Kostrad, Lettu Inf Jarwo tewas dalam pertempuran dengan pejuang Aceh.

Berdasarkan pengakuan Media Center militer Indonesia di Lhokseumawe, Lettu Jarwo bersama pasukannya yang berjumlah 15 personil diserang pasukan TNA yang hanya terdiri dari delapan pejuang. Dalam pertempuran itu pihak militer Indonesia juga menyatakan bahwa dua pasukannya juga mengalami luka-luka dalam pertempuran di Desa Blang Pandrah, Bireuen, Sabtu (31/7) itu. Keduanya yakni Serda Ansari Ali Aziz dan Praka Ramlan harus dipulangkan ke Jakarta karena luka-lukanya tersebut. Sementara kedelapan pejuang Aceh dilaporkan kembali ke baraknya dengan selamat.

Sementara itu Tgk Jamaika, jurubicara militer TNA wilayah Samudra Pasee dalam siaran persnya pada (2/8) melaporkan telah menyerang posisi pasukan Indonesia di Alue Meuh Kampung Gunci-Sawang, Samudera Pasee (Aceh Utara). Pasukan pejuang Aceh dari kompi 001/Inggreh menggunakan strategi dengan menunggu posisi musuh dalam keadaan tidak menguntungkan. Musuh yang sedang menyeberang sungai, terkejut mendapat serangan dari pejuang-pejuang Aceh, akibatnya diperkirakan 21 anggota Raider tersebut menjadi korban tewas atau luka-luka. Menurut Jamaika, masyarakat sekitar menyaksikan helikopter hilir mudik untuk mengangkut korban dalam pertempuran selama sejam tersebut. Dalam pertempuran pada hari Jum'at (30/7) pasukan TNA menggunakan senjata mesin berat (Browning) dan senjata otomatis campuran. Jamaika melaporkan tak ada korban dari pihak pejuang Aceh.

Sementara itu di Kampung Krueng Meusagop, Samalanga, tentera Indonesia yang mengepung pejuang GAM justru harus kembali ke baraknya dengan membawa mayat rekannya.

Peristiwa itu seperti diakui juru bicara militer Indonesia di Lhokseumawe bermula dari usaha 30 anggota TNI dari Yonif 321/GT untuk mengepung posisi pejuang GAM di Krueng Meusagob. Tentera Indonesia berusaha memerangkap pejuang Aceh dengan membagi pasukan mereka dalam dua tim. Kedua tim itu dipimpin oleh Serka M. Talib dan Letda Inf Habe Arioko. Namun pejuang Aceh--yang menurut sumber GAM di Jeunib berjumlah 5 orang--berada dalam keadaan siaga. Sehingga berlangsung kontak senjata yang menyebabkan Praka Supriyatna (NRP 3195044080372) tewas dan Serda Sumarto (NRP 31920647880372) mengalami luka parah yang menyebabkan harus dievakuasi ke sebuah rumah sakit di Medan.

Keberhasilan pejuang Aceh juga terjadi dalam pertempuran di kawasan Langkabue Seulumum, Aceh Rayeuk. Kali ini pasukan TNA Divisi Gajah Kheng berhasil menyerang pasukan dari Brimob Polda Kalimantan Timur. Pasukan Gajah Kheng yang berkekuatan 11 personil itu menewaskan 2 anggota brimob dan berhasil merampas 2 pucuk senjata SSI. Pertempuran yang terjadi pada Jum'at (16/7) itu dilaporkan Tgk Mucsalmina, juru bicara TNA di wilayah Aceh Rayeuk. Mucsalmina juga menyebutkan pasukan musuh yang berhasil ditewaskan itu adalah Bharada Yoyok, NRP N.B.I 77050663 dan Bharada Noor Muhammad, NRP N.B.I 79040791, nama dan nomor NRP keduanya diperoleh dari kartu anggota mereka yang juga berhasil disita. Dalam siaran persnya itu Tgk. Mucsalmina juga menegaskan bahwa pejuang-pejuang Aceh akan terus menyerang posisi-posisi militer Indonesia selagi mereka masih menyakiti rakyat Aceh dan mendiami bumi Aceh.



Photo by William Nessen, special to the Chronicle



# RANJAU DARAT ANTI PERSONIL PENGALAMAN ACHEH

*Tulisan ini merupakan makalah yang disampaikan wakil Batalion Inong Balèë, TNA dalam Musyawarah Geneva Call Tentang Pelarangan Ranjau Darat, di Geneva, 26-29 Agustus 2004*

## Situasi umum

Sebelum sampai kemari, kami terpaksa melalui berbagai rintangan yang sangat berat dalam perjalanan untuk keluar dari Aceh yang telah diisolir secara total oleh pihak pemerintahan kolonial Indonesia, dan kemudiannya untuk keluar dari wilayah Indonesia ke luar negeri, yang memerlukan berbagai bayaran liar, suatu perkara yang sudah menjadi biasa di Indonesia itu. Tetapi walaupun demikian, kami tidak pernah ragu bahwa kami akan sampai juga ke kota yang sangat indah dan bersejarah ini untuk mengecap udara damai, tenteram dan merdeka, walaupun hanya untuk beberapa hari saja, sebagaimana kami yakin bahwa kami akan sampai juga suatu hari nanti ke destinasi perjuangan kami, yaitu mengembalikan kedaulatan negara Aceh dan memerdekakan bangsa Aceh dari pendudukan dan penindasan kolonial Indonesia.

Konflik di Aceh telah berlangsung sejak 1976, ketika pemimpin kami Dr. Teungku Hasan di Tiro menyatakan kembali kemerdekaan Aceh. Sejak dimulainya aksi agresi militer oleh Pemerintah Kolonial Indonesia di Aceh, sebagai jawaban kepada kampanye non-violent Dr. Teungku Hasan di-Tiro, lebih 40 000 orang Aceh telah terbunuh, 95 persen dari jumlah tersebut adalah non-kombatan, termasuk perempuan dan kanak-kanak. Menurut berita terakhir (19 Agustus) yang dikeluarkan oleh pihak militer Indonesia sendiri sejumlah 1,159 orang telah dibunuh mereka sejak 10 bulan terakhir ini, yang berarti pukul rata 4 orang dibunuh mereka setiap hari. Pihak militer Indonesia mendakwa yang terbunuh itu adalah anggota Gerakan Aceh Merdeka; kalau dihitung-hitung jumlah anggota kami yang dikatakan telah dibunuh, ditangkap atau menyerah, maka tidak seorang pun yang masih tinggal di pihak GAM. Dakwaan Indonesia tersebut adalah suatu dusta yang begitu terang, karena setiap orang di Aceh tahu bahwa 95 % dari mereka yang dibunuh atau ditangkap oleh TNI/POLRI adalah anggota masyarakat sipil

Sebenarnya yang paling menderita dalam konflik ini adalah dua kelompok yang tidak terlibat itu, yaitu perempuan dan kanak-kanak. Berbagai laporan NGO dan bahkan dari badan-badan resmi termasuk PBB dan ICRC mengesahkan hakikat tersebut.

## Penggunaan Ranjau Darat

Namun demikian, penggunaan ranjau darat di Aceh belum merupakan faktor yang signifikan. Ada beberapa sebab mengapa ranjau darat tidak digunakan dalam konflik Aceh. Yang pertama sekali adalah karena di dalam konflik Aceh tidak ada garis demarkasi daerah kontrol. Kedua belah pihak yang berperang berada di mana-mana di seluruh Aceh. Dengan 80 000 serdadu di lapangan, bidang gerak militer dan polisi Indonesia meliputi seluruh pelosok

Acheh. Menanam ranjau anti-personnel dalam keadaan demikian memang tidak masuk akal.

Selain dari itu, pihak Indonesia belum menggunakannya bukan karena tidak suka atau pun karena menghormati larangan konvensi internasional, tetapi karena mereka tidak memerlukannya. Mereka dapat membunuh secara terbuka, menembak dengan membabi buta, membom dengan kapal terbang dan pesawat penempur jet, walaupun perjanjian pembelian alat-alat perang tersebut melarang penggunaannya terhadap insurgensi. Semua itu dapat mereka lakukan tanpa perlu memasang ranjau, cukup mereka tutup saja seluruh kawasan Aceh sebagai suatu penjara besar. Untuk menghambat pergerakan pihak gerilya, cukup bagi mereka dengan mengancam keselamatan masyarakat sipil. Tiap kali pihak gerilya menyerang sesuatu objek militer Indonesia, kampung-kampung berdekatan akan dibakar dan penduduknya dianiaya.

Mereka juga tidak menggunakan ranjau darat bukan karena mereka tidak mempunyainya. Mereka mempunyai pabrik senjata yang besar di Bandung, Jawa Barat, yaitu Pindad (Army Weaponry Industry) yang dapat menghasilkan ranjau-ranjau demikian dengan mudah, dan persenjataan jenis itu memang ada diproduksi di pabrik tersebut. Tetapi mereka belum menggunakannya karena takut terkena orang-orang mereka sendiri, sebab pasukan-pasukan yang dikirim ke Aceh adalah dari berbagai unit dan umumnya tidak disiplin dan kurang terlatih. Mereka sering bertempur sesama sendiri karena memperebutkan sumber-sumber keuangan, seperti pemetongan hutan secara tidak sah (illegal logging) dan mengontrol penanaman ganja di hutan-hutan. Sebagaimana diketahui, dan diakui sendiri oleh Presiden Megawati dalam sebuah pernyataannya di Parlemen baru-baru ini, pemerintah Indonesia hanya menyediakan 20% saja dari budget angkatan bersenjata, selebihnya mereka harus mencari sendiri. Ini dilakukan melalui sejumlah perusahaan komersil yang didirikan dengan sah, tetapi mendapat kontrak-kontrak yang sangat menguntungkan dari pemerintah tanpa melalui proses tender, kontrak-kontrak tentera bayaran seperti dengan ExxonMobil di Aceh dan Free Port Mining di Papua, dan juga kegiatan-kegiatan liar seperti perlindungan produksi dan penjualan narkotik, terutama ganja, pemetongan kayu (illegal logging), dan pemerasan terhadap para pedagang dan pengguna jalan raya.

Jadi mereka tidak menggunakan ranjau darat anti-personnel bukan karena kuatirkan terkena masyarakat sipil yang tidak bersalah, yang sememangnya menjadi target keganasan mereka, tetapi karena tidak sejalan dengan kegiatan ekonomi mereka.

Pihak TNA (GAM) tidak mempunyai ranjau darat anti personnel. Kami hanya bertempur dengan senjata-senjata yang mobil. Dalam serangan-serangan hendap (ambush)



kami memang menggunakan bom, tetapi bukan dari jenis “*victim triggered mines*” (ranjau yang diletuskan oleh korban sendiri), yang biasanya kami tanam di jalan yang akan dilalui oleh target kami, yaitu konvoi militer. Bom-bom demikian itu bukan dari type booby trap yang meletus sendiri bila disentuh, tetapi bom yang diletuskan secara manual melalui cable atau radio remote control. Kami tidak pernah meninggalkan perangkap samar (booby traps), ini adalah karena masyarakat kampung mencari penghidupan di hutan-hutan setelah mata pencaharian tradisional mereka seperti bersawah dan berternak dihancurkan oleh pihak militer dan polisi Indonesia.

Tetapi kami sangat khawatir akan skenario yang sedang berkembang sekarang ini, setelah pihak militer gagal menggunakan segala kekuatan mereka untuk menghancurkan perlawanan bangsa Aceh, dimana terdapat indikasi mereka akan mengalih kepada penggunaan ranjau untuk menghalang kami turun dari pangkalan-pangkalan kami di pergunungan dan hutan ke kawasan-kawasan yang berpenduduk. Mereka sekarang melarang rakyat kampung keluar lebih dari 100 meter jauhnya dari rumah mereka tanpa izin khusus. Mereka juga memaksa masyarakat mengungsi ke kem-kem pengungsi untuk memisahkan masyarakat daripada kami. Karena langkah-langkah tersebut tersebut masih tidak efektif untuk membatasi penglibatan rakyat dalam perjuangan resistansi, besar kemungkinan mereka akhirnya akan menggunakan juga ranjau-ranjau darat anti personel.

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan laporan bagaimana pihak militer dan polisi Indonesia menjadikan kekerasan terhadap perempuan sebagai senjata perang. Walaupun ini tidak ada hubungan yang langsung dengan penggunaan ranjau, tetapi kerusakan yang ditimbulkan terhadap masyarakat sipil, terutama perempuan dan kanak-kanak, tidak kurang dahsyat dari ranjau, dan karenanya mempunyai relevansi dalam diskusi di mesyuarat yang penting ini.

### **Dampak terhadap perempuan dan kanak-kanak.**

Sesungguhnya, perang di Aceh telah memberi dampak yang sangat menyedihkan kepada kaum perempuan. Kehilangan suami dan anak-anak lelaki mereka menimbulkan penderitaan, trauma dan kesusahan ekonomi yang sangat berat. Trauma mereka bertambah lagi karena tidak adanya jalan bagi mereka untuk mendapatkan keterangan tentang kematian atau penghilangan paksa sanak saudara mereka. Ini menyebabkan mereka lebih-lebih tidak terlindung, tidak berdaya dan terdedah kepada segala macam bahaya. Dalam tindakan pihak militer dan polisi Indonesia melakukan pencarian dari rumah ke rumah umpamanya, serdadu Indonesia sering sekali menculik perempuan yang tidak dapat memberitahu dimana suami/abang/adik atau anak-anak lelaki mereka berada. Perempuan-perempuan ini dikenakan siksaan fizikal dan seksual dalam tahanan. Sebuah laporan dari Pemerintah Amerika Serikat tahun ini mendedahkan bahwa karena undang-undang Indonesia menentukan bahwa pemerkosaan itu hanya menyangkut pemasukan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan (*penile penetration*), maka kasus-kasus penggunaan botol dan benda-benda lainnya tidak diklasifikasikan sebagai tindakan memperkosakan. Walaupun perbuatan demikian di

bawah undang-undang Indonesia sendiri masih merupakan suatu kesalahan karena dapat digolongkan dalam tindakan penyiksaan, namun dalam hal ini pihak militer dan polisi Indonesia telah mendapat kekebalan (*immunity*). Hal begitu sudah menjadi modus operandi yang dibenarkan oleh Jakarta, termasuk oleh Presiden Megawati sendiri yang menyatakan bahwa pihak militer Indonesia tidak perlu khawatir atau ragu-ragu tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia ketika melaksanakan tugas mereka. Pembenaan berlakunya kejahatan kemanusiaan demikian bahkan mendapat dukungan mahkamah peradilan, sebagaimana jelas dari keputusan-keputusan mahkamah Indonesia dalam kasus-kasus penjahat kemanusiaan militer Indonesia di Timor Timur baru-baru ini, dan juga atas kasus-kasus pembantaian terhadap para demonstran di Tanjung Priok

Para pekerja kemanusiaan dan mahasiswa terutamanya adalah yang paling banyak menderita intimidasi, penculikan, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan di luar hukum.

Sebuah laporan NGO menyebut: “Bagi setiap lelaki Aceh yang dibunuh atau dihilangkan, perempuan terpaksa membayar harga yang sangat tinggi secara emosi dan ekonomi. Ibu-ibu dan nenek-nenek yang menangis dan istri-istri dengan derai airmata terpaksa terus berusaha untuk memberi makan kepada anak-anak dan adik-adik mereka, yang menjalani hidup dalam ketakutan yang berterusan. Ramai perempuan yang mereka sendiri menjadi korban. Mereka menjalani siksaan dan pemerkosaan atau pelecehan seksual dalam rumah-rumah tahanan. Ramai yang ditahan bersama anak-anak dan bayi-bayi mereka, yang membuat kondisi mereka menjadi lebih buruk lagi karena anak-anak itu tidak dapat bersekolah. Mereka hidup dalam bahaya, ketakutan dan trauma di dalam kem-kem tahanan dan penjara yang keadaannya sungguh tidak sesuai untuk manusia”.

Sebuah daftar dalam bahasa Inggris saya sediakan untuk bacaan dan pertimbangan para peserta, yang merupakan satu daftar pendek dari para wanita yang ada dalam penjara Indonesia, menunjukkan variasi umur yang luas. Ini hanyalah nama-nama yang dapat kami peroleh dari pihak ketiga, seperti keluarga tahanan, karena data-data yang lebih lengkap tidak pernah dikeluarkan oleh yang berwajib kolonial Indonesia. Ramai lagi yang masih hilang atau sudah ditemui menjadi mayat setelah ditangkap. Tidak kurang yang dipaksa bekerja sebagai hamba sahaya di rumah-rumah para petinggi militer.

### **Daftar korban**

Kontrol oleh militer yang sangat represif terhadap Aceh menyebabkan sangat susah mengeluarkan informasi yang telah dikumpulkan oleh pekerja-pekerja kemanusiaan yang masih bekerja secara sembunyi-sembunyi di Aceh. TNA sendiri mempunyai data-data yang cukup komprehensif, tetapi kami tidak sebar karena kami tidak mau data-data tersebut dikotorkan dengan tuduhan bahwa itu hanya propaganda kami. Lis yang dibuat oleh NGO beberapa bulan yang lalu ini hanyalah merupakan puncak gunung es saja untuk digunakan sebagai contoh. Bagi mereka yang ingin melihat laporan-laporan lapangan TNA dipersilakan melawat website: [www.asnlf.net](http://www.asnlf.net)

Masyarakat internasional mestilah menekan Indonesia untuk membenarkan badan-badan asing yang netral untuk melawat Aceh dan membuat liputan yang akurat.



## MENGENAL BUMI ISKANDAR MUDA

Oleh Tgk Nasir Biduk



Muda memimpin negara Aceh Darussalam dinobatkan sebagai raja yang berperlemen yaitu raja yang menunaikan tugas-tugas kenegaraan atas kehendak hukum-hukum negara Aceh Darussalam dan telah di jalankan secara menyeluruh. Tidak dipungkiri hukum yang telah dijalankan oleh Sultan Iskandar Muda sebagian telah pernah di jalankan oleh sultan sebelumnya, namun dimasa Iskandar Muda, hukum Negara Aceh ini di tetapkan

Tanggal 4 April merupakan tanggal yang sangat penting bagi rakyat Aceh , pada tanggal tersebut telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam sejarah kesultanan Aceh. Hari itu senin tanggal 4 april 1607 diangkat seorang putra sultan Iskandar Ibni Muda Ali Riayat Ayah menjadi raja Aceh yang ke 19 berdasarkan garis silsilah dan keturunan.

Secara umum pola pemerintahan Sultan Iskandar Ibni Sultan Muda Ali Riayat Ayah atau yang lebih dikenal dengan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam atau Po Teumeruhoem, tidak jauh bedanya dengan pola pemerintahan sultan-sultan sebelumnya, yaitu berazaskan Islam dan *alsunnah* ataupun yang lebih di kenal dengan istilah piagam madinah. Namun secara khusus, pemerintahan Sultan Iskandar Muda lebih terjurus kepada perluasan departemen-departemen baik yang umum maupun komersial, juga pembenahan peraturan-peraturan dalam dan luar negeri, juga penekanan pada hubungan dua hala yang lebih liberal, industri domestik yang lebih berkualiti, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, penekanan hak individu yang lebih terjamin, dan penerapan adat hukum keseluruhan.

Ketokohan Sultan Iskandar Muda merupakan punca ketertarikan perhatian dunia-dunia international karena keunikan sistem yang dibangunnya. Keberhasilannya dapat dilihat dari kemahirannya dalam mengatur pemerintahan yang teratur dan sistematis. Kejayaan Sultan Iskandar

sebagai Qanun AL Asyi Meukuta Alam (Undang-undang Negara Aceh Meukuta Alam). Alam peudeng ditetapkan sebagai lambang bendera. Melayu Pasai, Aceh, dan Arab di jadikan bahasa resmi dalam negara. Hari kenegaraan di tetapkan tanggal 12 Zulqaidah 916 H, tanggal ini di tetapkan berdasarkan hari pengistiharan berdirinya kerajaan islam Melayu Samudra Pasai yang jatuh pada hari Jumat 12 zulhijjah 916 H.

Kejayaan Sultan Iskandar Muda dalam memimpin Aceh pada masa itu telah membawa Aceh terkenal keseluruh penjuru dunia baik dari sistem ekonomi, keberhasilan dalam bidang ekonomi terbukti dengan adanya perluasan dermaga-dermaga perlabuhan Malahayati di Kreung Raya, pembukaan pelabuhan Sabang, Kuala Langsa, Pante Cermen, dan Kuala Beukah, sebagai tempat penampungan atau singgahnya kapal-kapal dagang yang semakin pesat terutama dari kawasan dagang serantau seperti Turki, Arab, Siam, Filipina, dan Eropa.

Di bidang kedaulatan negara penerapan konsep Iskandar Muda bersifat liberal. Seperti penekanan tentang pembagian hak-hak dan kewajiban yang lebih menyeluruh, bermula dari peringkat atasan sampai pengaturan jabatan di tingkat – tingkat wilayah yang berpotensi berdaya saing maju dan tolak ansur ( sistem demokrasi).

Kemunculan Sultan Iskandar Muda pada waktu itu memang bertepatan dengan tuntutan zaman yang sangat membutuhkan seorang raja yang berpengaruh dan bijaksana, kehendak zaman ini bertitik tolak dari banyaknya

persoalan-persoalan yang rumit di tanah kerajaan pesisir pantai selat-selat seperti Malaka dan Johor, di tambah pula dengan ancaman serangan-serangan kerajaan Eropa terhadap Semenanjung Aceh sendiri, menyadari akan kelemahan-kelemahan yang ada atas kebijaksanaan Sultan sebelumnya, Iskandar Muda menggunakan kekuasaannya, dengan kekuasaan tersebut maka Sultan Iskandar Muda pun memerintahkan kerajaan semenanjung tanah Aceh untuk mempersiapkan diri dan memepkuat armada-armada yang ada sebagai benteng pertahanan sekaligus untuk mampu melindungi kerajaan selat dari gangguan-gangguan musuh.

Usaha lain yang di buat Sultan Iskandar Muda adalah memperkuat hubungan politik dengan kerajaan Abbasiah di Mesir dan Ustmaniyah di Turki. Keakraban hubungan Aceh dengan Turki dan Mesir dimanfaatkan sepenuhnya oleh kerajaan Aceh dengan harapan bantuan-bantuan alat perang yang canggih untuk di masukkan ke Aceh oleh kedua negara tersebut. Seperti altileri , meriam, armada-armada laut yang hebat, dan senjata-senjata mesin yang di sumbangkan oleh kerajaan Ustmaniyah Turki dan Abbasiah Mesir.

Keberhasilan Sultan Iskandar Muda bukan hanya terpaku di bidang kenegaraan sahaja tapi juga terfokus di bidang peperangan dan politik, misalnya kecerdikan dalam kepemimpinan pengaturan negara, diakui sebagai ketrampilan individu Iskandar Muda seperti pembentukan adat hukum, dimana Iskandar Muda mampu meletakkan adat dan hukum secara sinergis dan tidak pernah tumpang tindih melainkan saling menyokong antara adat dan hukum, kecocokan antar ketua adat yang disebut Malikul Adil dan ketua hukum disebut dengan Imam Malikul Adil atau Syaikhul Islam.

Sifat kesatria yang dimiliki oleh Iskandar Muda dapat mempengaruhi kehijrahan warga Turki, Mesir, Parsi untuk bermukim di bumi Aceh, hingga pada tahun-tahun sesudahnya juga kerajaan negara Islam tanah Aceh semakin mendapat perhatian dunia Islam lainnya, disamping potensi negara Aceh itu sendiri sebagai modal pengembangan Islam di nusantara.

Diposisi pengaturan basis – basis kekuatan militer pula dibawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mampu membangun kekuatan anting-anting pertahanan laut yang unggul seperti Malahayati yang merupakan salah satu tonggak kekuatan yang di takuti, Malahayati adalah armada angkatan laut pertama, gelar ini di ambil dari simbolisme keberanian sang ketua Malahayati salah satu pemimpin perempuan dan wakilnya Meurah Ganti.

Disamping mendapat bekal senjata-senjata canggih dari negara-negara penyumbang, Aceh juga telah sanggup membangun kemampuan multi militer dengan menggu-



nakan tenaga-tenaga pakarnya yang mahir. Kemampuan Aceh membina kekuatan armada militernya, membuat Aceh mampu mengimbangi kekuatan-kekuatan dari Eropa yang terlebih dulu telah memiliki kekuatan militer yang sangat lengkap.

Di segi pengaturan pentakbiran, Sultan Iskandar Muda telah mampu membentuk lembaga hukum yang efektif dan berpotensi menjalankan hukum hudud yang menyeluruh, berdasarkan undang-undang Islam yang ditegakkan di Aceh dengan panduan piagam Madina. Ketaatan bangsa Aceh menganut agamanya diakui oleh banyak pendakwah-pendakwah yang singgah di Aceh, maka bukan suatu rekayasa apabila negara Aceh Raya Darussalam secara resmi di gelar Serambi Mekkah. Gelar *Tanoeh Rencoeng* juga berpedoman kepada keberanian dan ketangguhan bangsa Aceh dalam mempertahankan tanahnya.

*Satu bangsa di kenal karna kemahsyuran dan kejelekan leluhurnya.*





PEULAJARAN BASA ATJÈH

Abdjat basa Atjèh deungon haraih latin

Haraih-haraih hudép:

- 1) a - mata, gata, raba, bala, kala, buta, saba, laba, sangka, bara, dada
- 2) i - ikat, iman, ilham, iseuëng, iléh, Iran, Islam, inseuëh, inong
- 3) u - ulat, utak, utok, uguh, ukeng, urat, ulim, ureuëng, useuëng, uram, upah, ulah, ubat
- 4) e - le, tahe, beh, beuhe, tet, bet naleuëng, tjet ngon reunong
- 5) é - ék, kéh, pék-pék kuwéh, gréh-gréh, tjirét, bukét, sakét, maté, apét
- 6) è - èk, hék, pèh-pèh, meugrèk-grèk, kèh-kèh, prèk-prèk, pakèh, salèh
- 8) èè - watèè, palèè, kajèè, brithèè, dilèè, lakèè, angkèè, asèè, malèè
- 9) eu - peuta, teumpat, leumeh, leumah, reubah, teulat, seumah, teulah
- 10) euê - kareuëh, limeuëh, kikeuëh, kireuëh, lheuëh, bibeuëh, aweuëh
- 11) 'ië - 'iëk, pr'iëk, su meu-br'iëk-br'iëk, leum'iëk
- 12) O - kom, prom, hantom, lom-lom, balum soh, Po teuh Allah
- 13) Ô - ulôn, phôn, thôn, ôn, bôn, kôm, djarôm, boh rôm-rôm, kawôm
- 14) 'O - soë teu'oh peulaku ?, hana me'oh sa'oh lé, 'oh no keuëh dilèè

- 15) 'Ô - soë teu'oh peukara njan bak gata ?
- 16) Oë - rugoë, gantoë, pudjoë, sagoë, paloë, sidroe, badjoë, taloë, uroë
- 17) uë - kuëh, puëh, aluë, suë teubèè, karuë, bruë, ka rabuë, lhuë
- 18) ui - reului, phui, ngui, meusui-sui, meutui, bui, boh seutui, krui

Haraih maté njang meusambông

- 1) sj - sjarat, meusjén that keu gata, sjèëdara, Sjèh Lah Geunta
- 2) dj - djalan, djih, djameuën, djareuëng, djangka, Djawa, djeumala
- 3) tj - tjara, tjangklak, tji, tjok, tjakra, tjapiëk, tjinuët, tjiriëk, tjantôi
- 4) ph - pha, phak, phong, phôk, phang-phô, phét, pheuët
- 5) ng - ngon, ngiëng, ngui, meu-ngèng-ngèng di luwa keulumbu, ngeuët
- 6) bh - bhaih, bhôi, bhôm, bhan dalam, bh'oh su leumoë
- 7) lh - lheuëh, lhat, lhop, lhih, lhôh, lhoh, lhap, lhet naleuëng
- 8) dh - dhoë, dhet, dhiët, meu-dhap-dhap
- 9) th - thô, that, bèk ka thôk-thôk, bèk ka tham-tham
- 10) nj - njang, nja k him, njoë, njan, njum
- 11) kh - kha, ukheuë, meu-khèp-khèp, saboh khong, khôp, djakhap
- 12) rh - rhuëng, rhak, rhup, rhuëp, rhap, rhet ateuëh bak kajèè, rhang



TANGISAN ANAK BANGSA

Muzakkir

Meraba-raba ia di tengah belantara  
 Mencari jejak tentang anak-anak bangsa  
 Yang berjalan di tengah tumpukan-tumpukan  
 Penderitaan dan penyiksaan  
 Jeritan dan tangisan tidak lagi bersuara  
 Melepaskan diri dari cengkaman kekejaman  
 Terkejut dan tertundukdi tengah rimba  
 Anak-anak bangsa telah terbungkus dengan kabus  
 Terkubur dalam jurang yang terjal  
 Menangis alam tanpa suara  
 Melihat penindasan dan kekejaman  
 Dalam perjalanan terakhir anak-anak bangsa  
 Tanpa berundur walau selangkah  
 Walau harus meredah setiap rimba  
 Demi anak-anak bangsa yang tercinta  
 Biar maut menabur di setiap langkah  
 biarpun rebah tubuh bersimbah darah  
 Mujahidin-mujahidin begitu gagah  
 dalam saf perjuangannya  
 mengusir setiap langkah musuh  
 demi kesetiiaannya pada anak bangsa  
 untuk menegak kembali kedaulatan  
 Negara Aceh Merdeka.

Samalanga, 2004

EKSPRESI

LAGU ACEH

CIPT.: NN JUDUL: ACEH LON SAYANG

4/4

0 1 1 2 3 3 | . 1 2 3 2.1 2 |  
 Da e rah A ceh ta noh lon sa yang,  
 keureuja udep, na so peutimang,

. 1 1 2 3 3 | . 11 2 7 1 . :||  
 ni bak teumpat nyan lon u dep ma te..  
 na so peuseunang, keureuja mate..  
 (coda):

0 5 i 7 6 i | . i 7 6 5.4 3 . |  
 Ta noh keuneu bak in da tu mo yang  
 ha te nyang su sah lon ra sa seu nang

(coda)  
 . 3 6 5 4.3 2 || . 3 4 6 5.4 3 . :||  
 lam poh deu ngon blang lu ah bu kon lee  
 A ceh lon sa yang

. 7 1 2 7 1 | . 0||  
 sam po an ma te...